BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa serta menyiapkan manusia sebagai warga negara yang baik. Melalui proses pendidikan akan menjadikan seseorang semakin memiliki makna, baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat yang akan mengantarkannya menjadi sumber daya manusia yang kompetitif. Mengingat manfaat pendidikan yang sangat luas dan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di segala bidang, maka pendidikan telah menjadi salah satu perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat sejak Indonesia merdeka. Berbagai macam upaya telah dilakukan untuk meningkatkan layanan pendidikan agar semakin berkualitas dari waktu ke waktu dan pendidikan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut telah dan terus dilakukan, mulai dari berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, sampai dengan peningkatan mutu manajemen sekolah. Upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat pendidikan dengan berbagai hal, termasuk peningkatan anggaran pendidikan 20 persen sebagai amanat Undang-undang Dasar, secara eksplisit pelaksanaan pendidikan tidak lagi hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, tetapi juga sudah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

Program BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar 9 tahun. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa setiap warga Negara berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Sedangkan pada ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Konsekwensi dari amanat undang-undang tersebut, maka pada tahun 2005 pemerintah menyelenggarakan program bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Dijelaskan dalam PP Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Melalui program ini pemerintah meberikan dana ke sekolah-sekolah yang bersedia memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan pesert program.

Berdasarkan Juknis Pelaksanaan BOS pada Madrasah tahun 2018 bahwa secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu. Dan secara khusus program BOS Bertujuan untuk :

1. Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta.
2. Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri, MTs negeri dan MA Negeri.
3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta.[1]

Besarnya biaya satuan dana BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan peserta program. Sekolah yang dicakup dalam program ini adalah SD/ MI dan SMP/MTs, baik negeri maupun swasta.

Adanya Program BOS bukan berarti berhentinya permasalahan pendidikan, namun memunculkan masalah baru terkait dengan penyelewengan, dan ketidak efektifan pengelolan dana BOS. Tujuan baik pemerintah, jika tidak diimbangi dengan sistem yang ada maka dapat menjadi bumerang dan menghasilkan masalah baru. Untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran maupun penggunaan dana BOS di tingkat sekolah perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan program. Mulyasa mengemukakan bahwa "Evaluasi atau *evaluation involves auditing* adalah pertanggungjawaban keuangan sekolah menyangkut seluruh pengeluaran dana sekolah dalam kaitannya dengan apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan".[2]

Namun, ketika kebijakan BOS dibarengi dengan kebijakan sekolah gratis, bagi sekolah-sekolah swasta menjadi masalah besar, meskipun pemerintah menerapkan sekolah gratis sementara ini hanya untuk SD dan SMP Negeri. Sekolah-sekolahh negeri sejauh ini biaya personalia ditanggung oleh Negara. Oleh

---

[1] Dirjen Pendidikan Islam, Nomor 451 Tahun 2018, *Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2018*, h. 2-3.

[2] Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 178.

sebab itu, dana BOS secara teoritis suda dapat menutup biaya operasional sekolah. Sementara itu, sekolah-sekolah swasta menanggung seluruh pembiayaan, termasuk biaya personalia. Maka, jika memang benar kebijakan BOS dimaksudkan untuk membuat pendidikan gratis, sekolah-sekolah swasta berada dalam kesulitan. Kesulitan-kesulitan itu antara lain: sekolahh swasta terancam kehilangan murid, karena murid mencari sekolah yang gratis. Atau jika sekolah swasta ikut menggratiskan seluruh siswa, operasional sekolah terancam kelangsungannya.

Hal tersebut juga sesuai dengan Choirul Fuad Yusuf dkk, bahwa salahsatu indikasi permasalahan pembiayaan di madrasah adalah kebanyakan madrasah terutama swasta mengalami kesulitan dalam sarana dan prasarana, keterbatasan jumlah tenaga kependidikandan kemampuan yang kurang memadai dalam memberikan imbalan kepada tenaga pendidik dan kependidikannya. Banyak tenaga pendidik yang menjalankan tugas tidak sesuai dengan bidang keahlian dan pengalamannya di duni pendidikan yang berakibat pada mutu pendidikan yang makin tertinggal.[3] Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Salis dalam Husaini Usman yang menyimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara mutu biaya dengan mutu pendidikan.[4]

Pemilihan lokasi penelitiaan di MTs Kusambi didasarkan bahwa MTs Kusambi merupakan salah satu dari 6 lembaga pendidikan yang sederajat yang bertempat di kecamatan Kusambi khususnya Desa Lapokainse yang bernaung di

---

[3] Choiruf Fuad Yusuf, Dkk, *Potret Madrasah dalam Media Massa*, (Jakarta : Puslitbang Pendidikan Agama dan keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2006), h.122

[4] Husaini Usman, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta : Proyek Penulisan Buku Bahan Ajar Universitas negeri yogyakarta, 2015), h.175.

bawah bimbingan yayasan Batanolaiworu. MTsS Kusambi merupakan sekolah swasta yang juga menerapkan sistem pendidikan gratis dimana dalam pelaksanaanya, sekolah tidak memungut biaya apapun kepada orang tua peserta didik. Sumber pembiayaan pendidikan di MTsS Kusambi hanya bersumber dari dana BOS. Hal ini sesuai dengan wawancara bersama ketua komite MTsS Kusambi bahwa ”orang tua siswa tidak lagi dibebankan komite. Semua pembiayaan pendidikan ditanggulangi oleh sekolah meskipun sekolah hanya mengandalkan dana BOS sebagai sumber pembiayaan pendidikannya”.[5]

Dari tahun ke tahun madrasah mengalami perkembangan yang cukup baik, baik dalam bidang akademik maupun non akademik yang dapat dilihat dari deretan prestasi yang dicapai oleh madrasah baik di tingkat Regional, Provinsi, hingga Nasional. Disamping itu, beberapa tahun terakhir, animo masyarakat untuk menjadikan madrasah sebagai pilihan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa pada setiap tahun yang terus bertambah. Sebagaimana keterangan dengan kepala madrasah bahwa “dalam tiga tahun terakhir jumlah peserta didik yang masuk selalu bertambah. Dimana awalnya kami hanya memilki siswa hanya puluhan orang, sekarang suda sekitar 200-an siswa yang kami miliki”.[6]

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa begitu banyak sekolah atau madrasah yang menerima dana BOS namun untuk kemajuannnya berbeda-beda. Selain itu peneliti memilih MTsS Kusambi, karena madrasah tersebut terlihat berkembang lebih baik dibanding sekolah atau madrasah yang ada di sekitarnya.

[5] La Dahim Bora, Ketua Komite MTsS Kusambi, *wawancara* tanggal 26 Maret 2019.
[6] La Meni, Kepala MTsS Kusambi, *wawancara* tanggal 24 Maret 2019.

Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang "**Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Tsanawiyyah Kusambi**."

B. Fokus Masalah

Agar terarahnya penelitian ini maka peneliti memfokuskan pada pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di MTs Kusambi. Berdasarkan uraian di atas maka fokus penelitian ini adalah proses pengelolaan dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTs Kusambi yang diawali dari tahap proses perencanaan hingga evaluasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut**:**

1. Bagaimana perencanaan pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTsS Kusambi?
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTsS Kusambi?
3. Bagaimana evaluasi dan pengawasan pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTsS Kusambi?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perencanaan pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTsS Kusambi

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTsS Kusambi
3. Untuk mengetahui evaluasi dan pengawasan pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTsS Kusambi.

E. Manfaaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap konsep-konsep serta teori khususnya pada bidang ilmu manajemen pendidikan Islam serta penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian di masa mendatang khususnya mengenai evektivitas pengelolaan dan Bantuan Operasional Sekolah.

2. Manfaat praktis

   a. Bagi Peneliti

   Untuk mengetahui secara langsung bagaimana pengelolaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran serta meemperluas wawasan mengenai manajemen pembiayaan mulai dari proses perencanaan sampai dengan evaluasi di lembaga pendidikan.

   b. Bagi Madrasah

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan bagi pengelola pendidikan baik tenaga pendidik maupun kependidikan agar dapat meningkatkan lembaga pendidikan MTsS Kusambi melalui pengelolaan dana BOS yang baik;

c. Bagi Masyarakat secara umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk lebih memahami tentang pengelolaan pembiayaan di lembaga pendidikan khususnya di MTsS Kusambi dalam pengelolaan BOS;

d. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan tambahan dalam bidang manajemen pendidikan, khususnya tentang manajemen pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. Pembaca dapat mengetahui bagaimana manajemen pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Atau pembaca dapat menjadikan penelitian ini sebagai gambaran untuk diterapkan baik di sekolah maupun di madrasah.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran ganda bagi para pembaca dalam memahami isi proposal ini, maka penulis mengemukakan pengertian judul bahwa, pengelolaan dana BOS adalah sebuah proses manajerial yang dilakukan dengan memanfaatkan sejumlah dana yang diterima dari pemerintah pada setiap semester yang digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan operasional pendidikan di MTsS Kusambi yang diawali dengan perencanaan pembiayaan yang berupa pengalokasian anggaran, pelaksanaan pembiayaan dan evaluasi pembiayaan secara evektif dan evisien dalam upaya pemenuhan 8 standar nasional pendidikan.